



LAPORAN HASIL PENELITIAN

tentang

**LATAR BELAKANG SOSIAL EKONOMI POLISI PETUGAS LAPANGAN,
DIKAITKAN DENGAN TUGAS DAN WEWENANGNYA
DI WILAYAH POLTABES SEMARANG**

**(The social economic back-ground of Indonesia police in
Semarang related to their duty and authority)**

Oleh :

Tim Peneliti

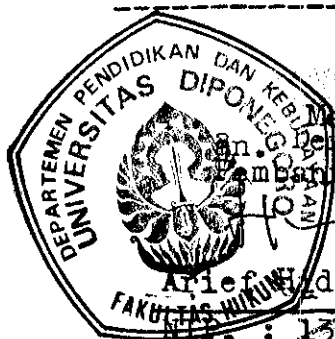
**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
1994**

Dibiayai oleh dana : O.P. dan F

LAPORAN AKHIR PENELITIAN

-
1. Judul penelitian : Latar belakang sosial ekonomi Po -
lisi petugas lapangan, dikaitkan
dengan tugas dan wewenangnya di
Wilayah Poltabes Semarang.
-
2. Kepala Proyek :
- a. Nama lengkap : Hirani Martono. SH.MH.
 - b. Pangkat dan jabatan: IV/B, Lektor Kepala Madya.
 - c. Pengalaman bidang : Ketua Proyek Penelitian
penelitian
 - d. Sedang mengadakan : Tidak
penelitian
 - e. Tempat penelitian : Wilayah Poltabes Semarang
 - e.1. Laboratorium/
Seksi : Hukum dan Pembangunan
 - e.2. Jurusan : -
 - e.3. Fakultas : Hukum
-
3. Jangka waktu peneli- : 6 (enam) bulan
tian
-
4. Biaya yang diperlukan: Rp.1.500.000,- (satu setengah juta
rupiah)
-
5. Sumber dana : OP dan F
-

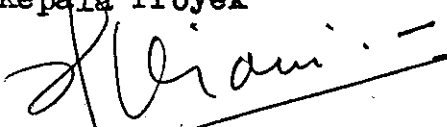
Semarang, Maret 1994



Mengetahui
An. G. Dekan
Kambingan Dekan II

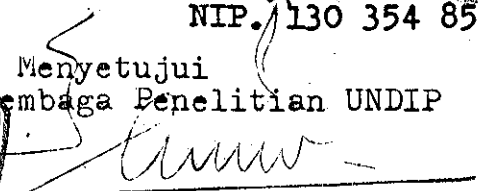
Arief Hidayat, S.H., M.H.
NIP. : 130.957.134

Kepala Proyek


Hirani Martono, SH
NIP. 130 354 854



Menyetujui
Ketua Lembaga Penelitian UNDIP


R. Boedhi Darmojo
NIP. : 130 431 357

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmatNya, kami team peneliti telah berhasil menyusun laporan penelitian tentang : "Faktor Sosial Ekonomi Polisi Petugas Lapangan Dalam Kaitan dengan tugas dan wewenangnya di Wilayah Poltabes - Semarang".

Keberhasilan penyusunan laporan penelitian ini telah banyak mendapatkan dukungan dari pihak kepolisian khususnya Kepolisian Kotabesar/Poltabes Semarang.

Untuk itu ucapan terima kasih kami sampaikan kepada

1. Yth. Bapak Kapoltabes Semarang
2. Yth. Bapak Kasat Sabhara Poltabes Semarang.
3. Yth. Bapak Kasat Lintas Poltabes Semarang.
4. Yth. Bapak Kabag Min Poltabes Semarang.
5. Yth. Bapak Kabag Keuangan Poltabes Semarang.
6. Yth. Bapak-bapak yang berkaitan dengan penelitian ini.

Semoga laporan penelitian ini akan bermanfaat untuk pengembangan ilmu, khususnya ilmu Hukum.

Semarang, 26 Maret 1994.

Tim Peneliti

DAFTAR ISI

	Haloman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
ABSTRAKSI	iii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan	7
BAB II. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	9
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN	
1. Metode Pendekatan	10
2. Spesifikasi Penelitian	10
3. Metode Penentuan Sampel	10
4. Metode Pengumpulan Data	11
5. Metode Analisis Data	12
BAB IV. LANDASAN TEORI	
A. Polisi, Fungsi dan Tugasnya.....	13
B. Polisi sebagai penegak hukum....	17
C. Peranan Lembaga Hukum sebagai organisasi Sosial	20
BAB V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
I. Gambaran Umum Tugas dan Wewenang Kesatuan Sabhara dan Kesatuan - Lantas di Wilayah Poltabes Semar- rang serta Faktor Sarana dan Pra sarana yang tersedia.....	23

II. Faktor Sosial ekonomi Polisi petugas Lapangan dikaitkan dengan tugas dan wewenangnya di Wilayah Poltabes Semarang	33
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	42
B. Saran	43
DAFTAR PUSTAKA	44

ABSTRAKSI

Many factor influensed police task done these factors is social factor and economic. Social factor's educational back ground, equipment and soft ware equipment. Otherwise economic factor is all of the matter concerned police life rank (grade) research point of that social an economic factor more influensed police task done.

BAB I

P E N D A H U L U A N

A. Latar Belakang Masalah

Sosok polisi sampai sekarang masih selalu menjadi sorotan masyarakat, terlebih lagi dengan munculnya bentuk-bentuk kejahatan baru dengan penggunaan sarana teknologi baru, adalah merupakan tantangan tersendiri terhadap tugas polisi.

Kritik-kritik yang bernada negatif, muncul dari berbagai pihak, sehingga apapun tindakan polisi yang positif masih belum kelihatan transparan di mata masyarakat.

Rupanya masih ada 2 (dua) hal yang melekat di hati masyarakat terhadap polisi, yaitu pertama masyarakat tidak ingin tahu, bahwa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, polisi itu terikat pada hukum. Mereka hanya ingin tahu tentang keberhasilan polisi di dalam menangani dan memberantas kejahatan.

Yang kedua adalah bahwa masyarakat kurang mengetahui kompleksitas dari tugas polisi, baik sebagai petugas yang menangani dan memburu kejahatan, maupun sekaligus sebagai petugas yang memberi perlindungan pada masyarakat. Kompleksitas tugas polisi tersebut dapat dilihat dari Undang-Undang tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara yang menyebutkan bahwa Kepolisian Negara dalam menjalankan tugasnya selalu menjunjung tinggi hak-hak asasi rakyat dan hukum negara, di samping be

berapa tugasnya yang lain yaitu memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum, mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit-penyakit masyarakat, memelihara keselamatan negara terhadap gangguan dari dalam, memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat, termasuk memberi perlindungan dan pertolongan, serta mengusahakan ketaatan Warga-Negara dan masyarakat terhadap peraturan-peraturan Negara.

Dari tugas-tugas tersebut di atas dapat diketahui bahwa tugas polisi tidak hanya mengarah pada upaya tindakan preventif, untuk mencegah munculnya tindak-tindak kriminal; sekaligus mengarah pula pada tindakan repressif yaitu tindakan yang memberantas kejahatan. Dengan kata lain, bahwa tugas polisi di satu sisi, memburu kejahatan yang mengganggu stabilitas dan keamanan masyarakat, dengan resiko bahaya yang mengancam jiwa personilnya, dan di sisi lain menangkap, memproses para pelaku kejahatan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Sehubungan dengan tugas yang demikian itu, Satjipto Rahardjo, Guru Besar Sosiologi Hukum dan Ketua Pusat Studi Kepolisian Fakultas Hukum Universitas Diponegoro mengatakan bahwa polisi adalah penegak "hukum jalanan" artinya tugas polisi langsung berada di tengah-tengah masyarakat, Tugas demikian ini tidak da-

pat digantikan dengan sarana teknologi. Dalam hal ini, polisi menjadi tokoh protagonis, yaitu tokoh ideal atau tokoh supermar seperti yang diharapkan oleh masyarakat.

Di dalam dunia pemikiran hukum, yaitu mengenai administrasi sistem peradilan pidana, Kepolisian merupakan sub-sistem dari satu sistem kesatuan yang di dalamnya ada lembaga-lembaga Kejaksaan, Pengadilan dan Pemasyarakatan.

Penerapan pemikiran sistemik dalam penyelenggaraan hukum pidana, menempatkan polisi pada kedudukan pos terdepan yang berfungsi sebagai pintu masuk ke dalam proses penyelenggaraan hukum pidana atau proses peradilan tersebut. Apa yang dilakukan dan tidak dilakukan oleh polisi akan mempengaruhi keseluruhan kerja sistem. Gambaran tersebut di atas menunjukkan betapa berat tugas polisi, khususnya para petugas lapangan yang secara langsung berada dan berhadapan dengan masyarakat.

Dengan melihat tugas polisi yang kompleks tersebut serta memanfaatkan metode sistemik, dimungkinkan untuk menguraikan kajian tentang struktur intern badan itu sendiri maupun dengan lingkungannya, atau dengan pengertian lain mengamati Kepolisian tersebut sebagai suatu organisasi yaitu mengamati upaya koordinasi dan pengintegrasian penggunaan sumber daya yang ada

untuk mencapai tujuan dari organisasi. Keberhasilan pengelolaan sumber daya dalam organisasi akan banyak memberikan manfaat terhadap keberhasilan sasaran utama dari Kepolisian sebagai lembaga hukum. Sumber-sumber daya tersebut antara lain adalah para pelaksana tugas, serta tehnik-tehnik yaitu sarana dan prasarana yang mendukung untuk menjalankan tugas.

Hal tersebut dikemukakan oleh karena Badan dunia seperti PBB telah pula mengungkapkan bahwa tugas polisi lebih berat. Ini dapat terlihat bahwa setiap penugasan internasional, kesejahteraan polisi lebih diperhatikan. Sebagai bukti uang saku polisi per hari dari PBB jauh lebih besar daripada uang saku tentara.

Di Indonesia, menurut Seorang pengamat Studi Kepolisian, Anton Tabah, disebutkan bahwa bensin patroli polisi sehari-hari disamakan dengan jatah BBM untuk angkatan lain yaitu 7 liter, padahal intensitas patroli polisi jauh lebih tinggi dari angkatan yang lain. Intensitas pekerjaan polisi yang tinggi disebabkan pekerjaan polisi bukan hanya menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang berkualitas hukum, melainkan semua masalah sehari-hari dalam hidup bermasyarakat.

Hal tersebut tentunya merupakan konsekuensi

dari tugas pokok polisi yang meliputi berbagai macam kegiatan, pemeliharaan dan pencegahan, seperti memelihara ketertiban dan keamanan, keselamatan orang, benda dan masyarakat serta mencegah dan memberantas penyakit masyarakat dan seterusnya (lihat Ketentuan Undang-Undang No. 13 tahun 1961).

Dalam penelitian ini, akan dicoba untuk memperoleh masukan melalui data-data yang dijadikan sampel dari polisi di Wilayah Poltabes Semarang, khususnya para petugas lapangan dari kesatuan Sabhara dan Satlantas dengan pangkat bintara ke bawah (Sersan, dengan catatan bahwa pengambilan sampel dari kedua kesatuan tersebut adalah bahwa mereka-mereka-lah yang selalu berada di tengah-tengah masyarakat, bahkan mereka-mereka-lah yang secara langsung berhadapan dan bertanggung jawab terhadap situasi Kamtibmas. Dengan melihat faktor sumber daya sebagai upaya mendukung tugas polisi, khususnya dari aspek sosial, seperti sarana dan prasarana, serta aspek ekonomi seperti gaji, insentive dan sebagainya, sebagai penunjang kebutuhan hidup mereka dan keluarganya, sudah barang tentu akan dapat terlihat sikap dan gerak dari petugas di dalam melaksanakan tugasnya, sehingga asumsi perilaku positif dan negatif bisa saja muncul .

Landasan dari munculnya asumsi dari perilaku penegak hukum tersebut dilandasi suatu teori Van Doorn yang mengatakan :

"Ia merupakan kebersamaan dan keadaan keterikat-an dari sejumlah manusia, yang tidak hanya keluar da-ri kerangka organisasi, karena manusia selalu cenderung untuk keluar dari setiap bentuk konstruksi organisasi, melainkan juga karena setiap kali terjatuh di luar ske-ma (organisasi), disebabkan oleh karena ia cenderung - untuk memberikan tafsirannya sendiri mengenai fungsi - nya dalam organisasi, berdasarkan kepribadiannya, asal usul sosial dan tingkat pendidikannya, kepentingan eko-nominya, serta keyakinan politik dan pandangan hidupnya sendiri". (Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum" hal. 26).

Dari konsep tersebut, mengisyaratkan adanya per-hatian yang seksama terhadap peranan dan faktor manusia tersebut.

Masalah lain yang dapat dikaitkan dengan hal tersebut di atas adalah berhubungan dengan soal lingkungan . Kutipan dari konsep Van Doorn itu akan menunjukkan bah-wa masalah lingkungan pribadi dari penegak hukum yang menjalankan fungsinya, dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor sebagaimana disebutkan di atas.

Dengan demikian, penelitian ini sedikit banyak ingin pula mengkaji korelasi antara berbagai faktor ling-kungan (dalam hal ini hanya faktor sosial dan faktor ekonomi) dengan tugas dan wewenang di Wilayah Poltabes Semarang.

Selanjutnya perlu pula dikemukakan, bahwa penelitian ini adalah penelitian awal dengan responden dari obyek penelitian adalah para polisi petugas lapangan, dengan harapan untuk selanjutnya ada kelanjutannya dengan ruang lingkup obyek penelitian yang lebih luas yaitu pandangan masyarakat terhadap perilaku polisi dalam melaksanakan tugasnya.

Alasan yang dapat dikemukakan adalah oleh karena keterbatasan waktu serta biaya penelitian. Dengan demikian hasil dari penelitian ini adalah mendeskripsikan atau memberikan gambaran apakah ada korelasi antara tugas dan wewenang polisi petugas lapangan, dengan faktor sosial dan ekonomi yang dapat mempengaruhi tugas dan wewenangnya tersebut.

B. Permasalahan

Mengingat pentingnya tugas polisi petugas lapangan pada saat ini, yaitu tugasnya di dalam masyarakat yang sedang mengalami perubahan seperti sekarang ini, terutama di bidang informasi, transportasi khususnya dan teknologi pada umumnya, maka pengelolaan organisasi atau badan yang melaksanakan tugas, perlu mendapat perhatian yang lebih besar oleh karena keberhasilan dalam pengelolaan organisasi tersebut akan sangat mendukung keberhasilan lembaga tersebut sebagai lembaga hukum yang bertanggung jawab terhadap situasi keamanan dan ketertiban masyarakat.

Berbagai masalah yang diajukan adalah :

1. Bagaimana intensitas kerja personil polisi petugas lapangan di Wilayah Poltabes Semarang ?
2. Apakah faktor sosial - ekonomi memberi pengaruh terhadap tugas dan wewenang personil, polisi petugas lapangan ?